



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2020

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BOGOR, JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK selama Tahun 2020, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat perencanaan kinerja, serta memuat analisis pencapaian kinerja kegiatan yang telah dicapai oleh Pusat Diklat SDM LHK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2020.

Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberi informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung jalannya organisasi secara efektif dan efisien, baik di unit pusat maupun di unit daerah dan menjadi bagian dalam mewujudkan pencapaian peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sesuai tujuan penyusunannya.

Bogor, Januari 2021
Plh.Kepala Pusat,



Puji Iswari, S.Hut.,M.Si
NIP. 19690625 199803 2 002



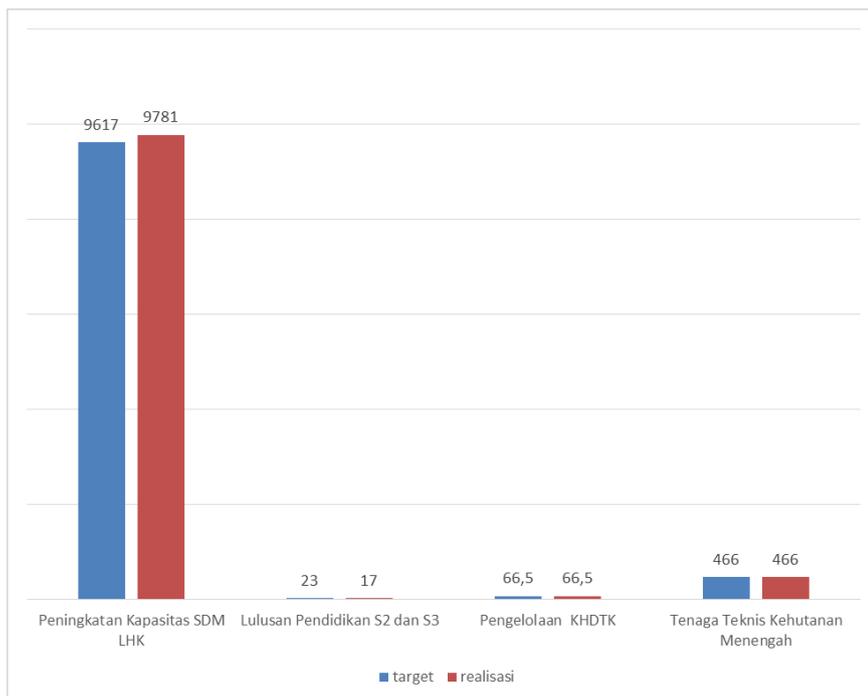
RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) merupakan unit kerja/perangkat organisasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengacu pada Peraturan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2015 – 2019 diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 187/DIK/PU/OTL.2/10/2017 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, maka pada Tahun 2020 ditetapkan rencana kinerja dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM LHK. Disamping itu Pusat Diklat SDM LHK juga menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3), nilai KHDTK yang dikelola dan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia, Realisasi keuangan satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 sebesar Rp.39.618.323.396,- atau sebesar 97,90%, dengan realisasi fisik sebesar 100%, sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 untuk kegiatan indikator kinerja pada SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebesar 101,70%, SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3) sebesar 73.91%, Pengelolaan KHDTK sebesar 66.5%, dan Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan 100% sehingga masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan. Grafik Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK tahun 2020 sebagai berikut:





Pada Tahun 2020 terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam capaian kinerja pelaksanaan diklat yaitu munculnya pandemi COVID-19 yang membuat Pusat Diklat harus merubah pelaksanaan diklat yang awalnya menggunakan metode klasikal tatap muka di kampus Pusdiklat SDM LHK menjadi metode pembelajaran jarak jauh (e-learning) menggunakan Learning Management System (LMS), ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai dan sumberdaya manusia (widyaiswara dan pengelola diklat) yang profesional dan kompeten. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan diklat terdapat pula permasalahan tidak tercapainya target jumlah IKK untuk kegiatan SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3) sebanyak 23 orang, namun realisasinya hanya 17 orang, hal ini dikarenakan adanya permohonan perpanjangan studi karena munculnya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan, pembinaan dan peningkatan melalui remedial, sehingga dapat tercapai target IKK tersebut.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
SINGKATAN-SINGKATAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Pengertian	2
D. Manfaat Laporan Kinerja (LKj)Instansi Pemerintah	3
E. Landasan Hukum	3
F. Tugas dan Fungsi	5
G. Organisasi	6
BAB II.PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Pusat Diklat SDM LHK 2015-2019	12
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA.2020.....	12
C. Rencana Kinerja/Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2020.....	14
D. Perjanjian KinerjaPusat Diklat SDM LHK Tahun 2020.....	34
E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	35



BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
1. Review Terhadap Dokumen Perencanaan	37
2. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020.....	46
3. Metode Pengukuran	47
4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	48
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	50
B. REALISASI ANGGARAN	70
1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja	74
2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut	70
BAB IV.PENUTUP	71
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan Pegawai Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan jabatan pada Tahun 2020	8
Tabel 2	Keadaan Pegawai Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan golongan Tahun 2020.....	8
Tabel 3	Keadaan pegawai Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020	8
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Kantor di Pusat Diklat SDM LHK.....	9
Tabel 5	Rencana Kerja IKK Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan anggaran Tahun 2020	14
Tabel 6	Perincian Jenis Belanja DIPA BA. 29 Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020.....	33
Tabel 7	Perincian Sumber Dana DIPA BA. 29 Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020.....	33
Tabel 8	Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK TA.2020.....	34
Tabel 9	Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2020.....	36
Tabel 10	Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN dan APBN-P Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020.....	38
Tabel 11	Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020.....	40
Tabel 12	Rincian anggaran APBN-P pada Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan akun Tahun 2020	46
Tabel 13	Efektifitas Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020.....	50
Tabel 14	Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020.....	51
Tabel 15	Rasio Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 untuk Target Jangka Menengah	52
Tabel 16	Target dan Realisasi Jenis Diklat di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020	54



Tabel 17	Target dan Realisasi Diklat Kepemimpinandi Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020	55
Tabel 18	Target dan Realisasi Diklat Administrasidi Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020	56
Tabel 19	Target dan Realisasi Diklat Fungsional di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020	57
Tabel 20	Capaian Kinerja Tahun 2020	58
Tabel 21	Sebaran Lulusan Tenaga Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2020	68
Tabel 22	Pelaksanaan Capaian Anggaran Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK	7
Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM LHK.....	53
Gambar 3. Presentasi Hasil Studi Karyasiswa untuk Program Doktor (S3)	62
Gambar 4. Praktek kerja bagi siswa SMK Kehutanan agar memiliki kompetensi dan siap berkompetisi di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	69
Gambar 5. Buku Hasil Karya Tulis Siswa SMK Kehutanan Negeri	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024
- Lampiran 2. Matriks Rencana Kinerja Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 202
- Lampiran 3. Indikator Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja



SINGKATAN-SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BLHD	: Badan Lingkungan Hidup Daerah
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUP	: Kelompok Usaha Produktif
LH	: Lingkungan Hidup
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKj	: Laporan Kinerja
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
P2SDM	: Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PK	: Perjanjian Kinerja
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RSKKNi	: Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SDH	: Sumber Daya Hutan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMKK	: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan melakukan akuntabilitas kinerja masing masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja.

Penyelenggaraan sistem pemerintah yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tujuan seluruh negara di dunia. Tujuan tersebut menjadi sebuah prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Demikian juga dengan pemerintah Republik Indonesia yang juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, pemerintah berkewajiban melaporkan kinerja dalam bentuk akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor P. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi oleh karena itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berkekuatan hukum (legitimate) yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan hasil evaluasi kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penentuan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM lingkungan hidup dan kehutanan pada waktu yang akan datang.

B. Maksud dan tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang.

C. Pengertian

1. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
2. Capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dampak adalah pengaruh kuat dari suatu kebijakan publik yang mendatangkan akibat/manfaat bagi masyarakat luas.
4. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan pada satuan kerja.
5. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
6. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
7. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah.

8. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.
11. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih pendek dari tujuan.
12. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

D. Manfaat Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah

Manfaat LKj Instansi Pemerintah yaitu untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

E. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- 8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11) Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- 12) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.6/SETBP2SDM/2015 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;



- 13) Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.208/DIK/PU/WAS.0/9/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024;
- 14) Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.202/DIK/PU/WAS.0/8/2019 tanggal 10 September 2020 Perubahan Ketiga SK.409/DIK/PU/WAS.0/11/2019 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satker Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020;
- 15) Surat Pengesahan DIPA Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SP DIPA-029.08.1.400210/2020 tanggal 29 September 2020.

F. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

G. Organisasi

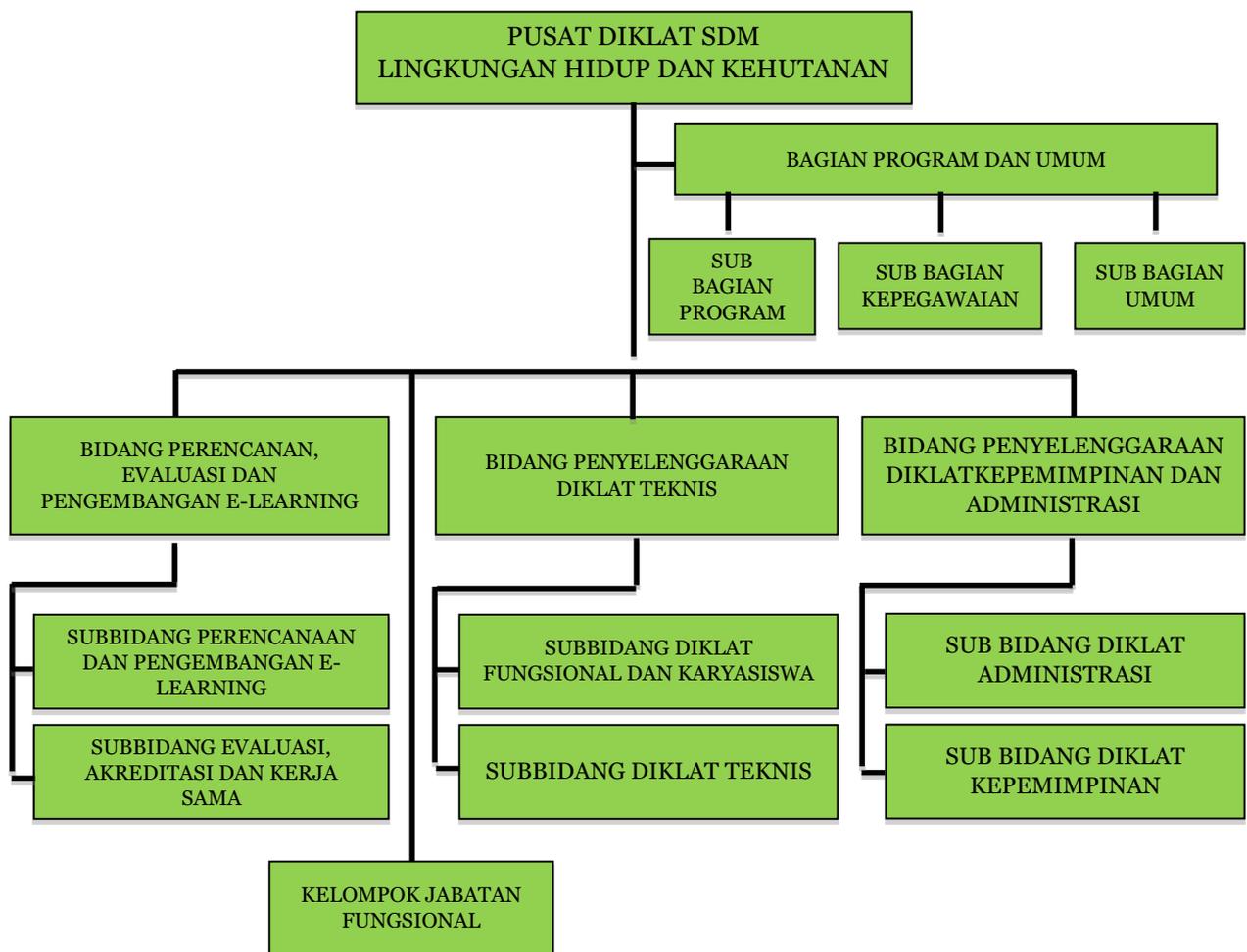
1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik.
2. Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi.
4. Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan program, anggaran, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan umum.

Struktur organisasi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Gambar 1.





Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 adalah sebanyak 131 orang, terdiri dari pejabat Struktural sebanyak 11 orang, pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 32 orang, pejabat Fungsional Arsiparis/Pranata Komputer sebanyak 1 orang, pejabat Fungsional Umum sebanyak 61 orang, CPNS sebanyak 1 orang dan Tenaga Honor/Upah/Kontrak 25 orang. Keadaan pegawai di Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan pada Desember 2020 disajikan pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	11
2	Fungsional Widyaiswara	32
3	Fungsional Arsiparis/Pranata	1
4	Fungsional Umum	61
5	CPNS	1
6	Tenaga Honor/Upah/Kontrak	25
Jumlah		131

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 2. Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Golongan

Instansi	Golongan																Jumlah (orang)	
	IV					III				II				I				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
Pusat Diklat SDM LHK	7	7	6	7	6	11	31	6	14	20	4	4	8	0	0	0	0	131
Jumlah	33					62				36				0				

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 3. Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020.

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Doktor / Ph.D / S-3	12
2	Master / Magister / S-2	32
3	Sarjana / S-1	23
4	Diploma	6
5	SLTA	47
6	SLTP	7
7	SD	4
Jumlah		131

Keterangan : Termasuk Tenaga Honor/Upah/Kontrak

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

No.	Prasarana	Luas (m2)	Jumlah (Unit)	Daya Tampung (orang)	Kondisi	Keterangan
1	Ruang Kelas	3.120	10	360	Baik	Fasilitas LCD Projector, Screen, AC, Papan Flip chart, Meja kursi, Komputer, Sound system, printer
2	Ruang Diskusi	120	2	122	Baik	Fasilitas LCD Projector, Screen, AC, Papan Flip chart, Meja kursi, Komputer, Sound system, printer
3	Ruang Makan	240	1	200	Baik	Fasilitas AC, Tapedack, Meja dan Kursi
4	Aula	362	1	200	Baik	Fasilitas AC, LCD, Screen, Podium, Sound system, Laptop, Meja dan Kursi
5	Asrama	5.026	1	140	Baik	Fas : AC, TV, kamar mandi dalam, tempat belajar, Hall/Gordon
6	Perpustakaan	105	1	20	Baik	Fas : Full AC, Koleksi buku, Desktop, printer, Wifi

No.	Prasarana	Luas (m2)	Jumlah (Unit)	Daya Tampung (orang)	Kondisi	Keterangan
7	Media Center	105	1	10	Baik	Fasilitas AC, Komputer Spesifikasi Khusus, Printer, Wifi
8	Tempat Ibadah (Mesjid)	185	1	120	Baik	Masjid Ass – Salam
9	Laboratorium Bahasa Inggris dan Komputer	122	2	20	Baik	Fasilitas lengkap : AC, computer, software Bahasa Inggris, LCD Projector, Screen, Printer, Sound System
					Baik	Ruang Ulin: Fasilitas Full AC, PC. Komputer, Server, LCD Projector, Printer, Flip Chart, Layar LCD, Meja Kursi, dll
10	Rumah Dinas	147	1		Baik	Printer, Flip Chart, Layar LCD, Meja, Kursi, dll
11	Sarana Olah raga	300	3		Baik	Fasilitas Alat Kebugaran (fitness), AC
12	Gedung Kantor	1.380	1		Baik	
13	Kendaraan Roda 6		2		Baik	Bus dengan kapasitas 24 orang
14	Kendaraan Roda 4		15		Baik	14 Minibus, 1 Micro Bus
15	Kendaraan Roda 2		5		Baik	
16	Pick Up		1		Baik	
17	Mobil Patroli		1		Baik	



No.	Prasarana	Luas (m2)	Jumlah (Unit)	Daya Tampung (orang)	Kondisi	Keterangan
18	Komputer P.C.		138		Baik	138 Baik
19	LCD Projector		27			17 Baik, 3 RR, 7 RB
20	Digital Camera		25			20 Baik, 5 RB
21	Video Camera		2		Baik	2 Baik
22	Printer		137		Baik	137 Baik

Sumber data : Sub Bagian Umum



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK.208/DIK/PU/WASS.0/9/2020 tanggal 14 September 2020 mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 Nomor P.07/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 Tahun 2020-2024 merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan kediklatan, baik diklat administrasi, diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional dan kependidikan.

Pusat Diklat SDM LHK merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Badan P2SDM yang dituntut untuk mampu menyelenggarakan diklat aparatur dan non aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan diklat dan kependidikan selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan tercantum dalam dokumen Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024. Matriks Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Lampiran 1.

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2020

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 memuat uraian tercantum dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana Renstra Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahunan (RKT) berisi sasaran program dari kegiatan yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan laporan kinerja (LKj) Pusat Diklat SDM LHK.

Substansi Renja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 merupakan jabaran lebih lanjut dari 8 sasaran yang ada pada RKT Pusat Diklat SDM LHK, yang terdiri dari:

1. Meningkatnya kapasitas aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan diklat administrasi, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
2. Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan;
3. Terselenggaranya pembinaan pendidikan kehutanan tingkat menengah;
4. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada 5 unit kerja SMK Kehutanan;
5. Terselenggaranya pengelolaan pendidikan lanjutan program pasca sarjana;
6. Meningkatnya kemampuan organisasi Pusat Diklat SDM LHK beserta UPT dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas;
7. Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan; dan
8. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Dokumen Renja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan/usulan rencana kerja dan anggaran masing–masing bagian di lingkup Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020. Adapun pagu anggaran Renja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 adalah sebesar Rp.40.469.312.000,- yang merupakan 14,19% dari pagu Badan P2SDM sebesar Rp.285.216.386.000,- untuk penyelenggaraan program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM. Pagu rencana kerja Indikator Kinerja kegiatan Pusat Diklat SDM LHK sebesar Rp. 18.203.332.000,-. Rincian Rencana Kerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Rencana Kerja IKK Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan Anggaran Tahun 2020

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu(Rp).	Keterangan
1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	a. Tersedianya SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebanyak 56.104 orang	14.845.542.000,-	merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
	b. Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3) sebanyak 225 orang	2.872.440.000,-	
	c. Nilai KHDTK yang dikelola sebesar 66,50 poin	100.000.000,-	
2. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (SMKK)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 2.364 orang	385.350.000,-	

C. Rencana Kinerja/Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2020

Rencana Kinerja merupakan rencana pelaksanaan kegiatan pada Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung penyelenggaraan diklat dan kependidikan dengan total anggaran kediklatan sebesar Rp.40.469.312.000,- yang terbagi dalam 4 (empat) unit kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning yang dijabarkan dalam elemen kegiatan:
 - a. Perencanaan dan Pengembangan E-Learning, komponen kegiatannya yaitu
 - 1) Hibah Luar Negeri

Pada tahun 2020, Pusat Diklat SDM LHK masih melanjutkan program hibah kerjasama dengan *Forest Investment Programme (FIP)*, yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan mitigasi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan (REDD+) di daerah serta untuk meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adat serta komunitas lokal



dalam menerapkan REDD+ melalui pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak dan provinsi.

Indonesia dengan dukungan FIP sedang membuat terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan. Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan pengelolaan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang ditujukan untuk memperbaiki tata kelola hutan yang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang kondusif, peluang investasi dalam *Sustainable Forest Management (SFM)*, manajemen hutan berbasis komunitas (CBFM) dan REDD+.

Pusat Diklat SDM LHK sebagai lembaga diklat bidang lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai tupoksi menyelenggarakan diklat dan menyediakan sarana dan metodologi kediklatan berupa kurikulum dan modul diklat. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program tersebut adalah : Pengembangan Kursil/Modul Baru (14 Komoditas), *Training Workshop Blended Learning, Face to Face on Site Training (Blended Learning for Various Training)*, *KPH Operationalization and Change Management Trainings*, *Central Level Administration-Knowledge Centre Developer*, *Competitions*, Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), dan Perencanaan Program Diklat Jangka Panjang. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 sebesar Rp2.783.259.000,-.

2) Nilai KHDTK yang dikelola

Indikator kinerja kegiatan KHDTK adalah Nilai KHDTK yang dikelola. KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan KHDTK dalam pengelolaan kawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan juga sarana prasarana penunjang pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan penilaian pengelolaan KHDTK di 7 (tujuh) KHDTK. Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Kegiatan nilai Pengelolaan KHDTK sebesar 66,50 poin. Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pembinaan pengelolaan kawasan hutan diklat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah Rp 100.000.000,-.



b. Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama

Komponen kegiatan pada sub bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama yaitu:

1) Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan diperlukan kegiatan akreditasi kelembagaan diklat eksternal dan internal. Akreditasi lembaga diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur lembaga diklat. Lembaga diklat internal adalah seluruh BDLHK sedangkan lembaga diklat eksternal adalah Pusat Diklat SDM Perhutani. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp22.360.000

2) Monitoring, Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Diklat

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan diklat dan merumuskan penyelesaiannya sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelaksanaan diklat ke depan. Kegiatan ini terdiri dari : penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, LKj, dan statistik diklat. Anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp127.930.000,-.

3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan aset BMN, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp11.875.000,-.

4) Evaluasi Pasca Diklat (EPD)

Diklat yang berkualitas adalah yang mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta sesuai dengan tujuan diklat dan pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja para peserta diklat di tempat tugasnya. Kegiatan evaluasi pasca diklat dimaksudkan untuk mengetahui dampak diklat terhadap

kinerja para peserta diklat setelah mengikuti proses diklat. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah diperolehnya bahan untuk perbaikan penyelenggaraan diklat ke depan, meliputi materi, metoda, alat bantu pembelajaran, lokasi praktek, dll. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp151.735.000,-.

5) Buku Terbitan/Majalah/Leaflet

Dalam rangka publikasi dan informasi program dan hasil diklat serta sebagai salah satu upaya pengembangan profesi widyaiswara, maka diterbitkan majalah kediklatan dan penerbitan leaflet, majalah dan buku. Majalah dan buku diklat ini didistribusikan kepada pihak-pihak terkait (pengguna diklat), sehingga semua pihak terkait akan memperoleh informasi kediklatan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp86.845.000,-

6) Pengelolaan Informasi Kediklatan

Dalam era informasi dan komunikasi yang semakin canggih, maka diklat lingkungan hidup dan kehutanan telah mengembangkan suatu teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperluas publikasi kediklatan serta akselerasi komunikasi kediklatan di seluruh unit kerja lingkup Pusdiklat SDM LHK melalui website <http://portal.pusdiklatsdmlhk.id> untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kediklatan/website dialokasikan anggaran dalam pagu sebesar Rp25.895.000,-

7) Pengembangan Kerjasama Kediklatan

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kediklatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan diklat yang berkelanjutan sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait berupa penyediaan dana, tenaga pengajar/narasumber, moderator, dan pengembangan kurikulum secara terus menerus dan sistemik sehingga diklat dapat memenuhi kebutuhan para pengguna yang setiap saat terus berkembang. Untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terkait, maka dilaksanakan penyusunan bahan kerjasama, dan kerjasama pengembangan SDM. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam pagu sebesar Rp60.695.000,-.



8) Evaluasi Pelaporan dan Publikasi

Kegiatan evaluasi pelaporan dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan pelaporan serta pencetakan buku. Adapun anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp119.100.000,-.

2. Penyelenggaraan Diklat Teknis

a. Diklat Teknis

Komponen kegiatan dalam penyelenggaraan diklat teknis yaitu:

1) Penyelenggaraan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Izin Jarak Jauh Secara Elektronik (E-learning)

Dengan adanya Pandemi Covid-19 Kepala BP2SDM mengeluarkan edaran melalui Surat Edaran Kepala BP2SDM Nomor SE.1/P2SDM/SET/SET.1/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 dimana salah satu pointnya adalah pelaksanaan penyelenggaraan diklat diutamakan menggunakan metode e-learning. Pusat Diklat SDM LHK melakukan revisi dengan mengganti beberapa diklat klasikal menjadi diklat e-learning. Untuk diklat pertama yang dilaksanakan Pusdiklat SDM LHK bekerjasama dengan Dirjen PSKL yaitu untuk melatih para pendamping Perhutanan sosial dengan jumlah peserta sebanyak 3000 orang. Untuk yang dilaksanakan di Pusdiklat sebanyak 480 orang dan di 7 (tujuh) BDLHK masing-masing melaksanakan diklat sebanyak 360 orang. Dirjen PSKL berperan dalam menyediakan calon peserta dan pemberian fasilitas bagi peserta yaitu uang harian, dan pemberian bantuan kuota data internet. Dalam pelaksanaan di Pusdiklat SDM LHK anggaran yang digunakan sebesar Rp326.200.000,-.

2) Pelatihan Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum Secara Elektronik (E-Learning)

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning bagi Masyarakat Peduli Api dengan jumlah peserta sebanyak 86 Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp130.570.000.-

3) Pelatihan Analisis Neraca Air sebagai Dasar Mitigasi Bencana Alam dan Rehabilitasi Lahan Secara Elektronik (E-Learning)

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning dengan jumlah peserta sebanyak 198 Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp137.370.000.-



- 4) Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program Perhutanan Sosial Secara Elektronik.

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning dengan jumlah peserta sebanyak 180 Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp277.800.000.-

- 5) Pelatihan Pemetaan Partisipatif bagi program TORA Berbasis Digital Bagi Program Perhutanan Sosial Secara Elektronik.

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning dengan jumlah peserta sebanyak 120 Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp102.000.000.-

- 6) Pelatihan Program Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di bidang peningkatan ketahanan pangan nasional terpadu serta menunjang kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tenaga pendamping untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani pemegang ijin perhutanan sosial. Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung Program PEN mengadakan Pelatihan bagi Anggota KTH dan KUPS dengan Rincian sebagai berikut:

- a) Pelatihan Agroforestry (Partisipatif Peningkatan Kapasitas KTH dan KUPS dalam Pengelolaan Usaha) secara Blended Learning , Pelatihan ini diikuti oleh 1.983 orang dengan jumlah anggaran Rp3.994.251.000.-
 - b) Pelatihan Bagi Pendamping, Pelatihan ini diikuti oleh 93 orang dengan jumlah anggaran Rp150.000.000.-
 - c) Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha) Secara Klasikal On Site Pelatihan ini diikuti oleh 682 orang dengan jumlah anggaran Rp2.115.749.000.-
- 7) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan
Sebagai Instansi pembina teknis SMK Kehutanan Pusat Diklat SDM LHK melakukan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK Kehutanan anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp45.650.000,-
 - 8) Pendukung Kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020

Pada tahun 2020, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020. Dalam melaksanakan kegiatan ini, terdapat beberapa kebutuhan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu pencetakan buku, rapat pembahasan, dialog bersama menteri KLHK, dan publikasi. Maka dari itu disusunlah Pendukung Kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp70.350.000,-.

9) Pembinaan Teknis SMK Kehutanan dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka melakukan pembinaan teknis SMK Kehutanan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan supervisi, monitoring Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM LHK| 30 dan evaluasi Penyelenggaraan SMK Kehutanan dan rapat-rapat pembinaan SMK Kehutanan dengan instansi terkait, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp92.600.000,- .

10) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)

Indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan adalah tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, sebanyak 466 orang. Pusdiklat SDM LHK sebagai pembina teknis bagi SMK Kehutanan Negeri dan terdapat di 5 lokasi yaitu SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, SMK Kehutanan Negeri Makassar, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, SMK Kehutanan Negeri Samarinda, dan SMK Kehutanan Negeri Manokwari melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan, Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan dengan output kegiatan berupa Dokumen Perencanaan dan Pembinaan. Pada tahun 2020 akibat Covid-19 terjadi refocusing anggaran untuk kegiatan Perencanaan dan Pembinaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan, Lomba Karya Tulis SMK Kehutanan, Pembinaan Teknis SMK Kehutanan, Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (Magang, Studi banding, Pelatihan), dan Penyegaran



Penilai Angka Kredit Guru. Anggaran untuk membiayai dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp385.350.000,-.

b. Diklat Fungsional dan Karyasiswa

Komponen kegiatan dalam penyelenggaraan diklat fungsional dan karyasiswa yaitu:

1) Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)

Diklat Fungsional PEH yang dilaksanakan adalah :

- a) Pelatihan PEH Jenjang Madya jarak jauh dengan elektronik (e-learning) direncanakan akan diikuti oleh 64 orang peserta. Anggaran biaya yang disediakan dalam pagu 2020 adalah sebesar Rp150.680.000,-.
- b) Pelatihan Pembentukan PEH Tk. Ahli Angk.I dan Angk.II dilaksanakan secara klasikal karena sebelum adanya Pandemi Covid-19 yang diikuti oleh 76 orang dengan anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp557.915.000
- c) Pelatihan Pembentukan PEH Tk. Ahli Angk. III, IV dan V jarak jauh dengan elektronik (e-learning) direncanakan akan diikuti oleh 112 orang dengan anggaran dalam pagu 2020 adalah sebesar Rp314.920.000,-.

2) Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Polisi Hutan (Polhut)

Diklat Fungsional Polhut yang dilaksanakan adalah Pelatihan Pembentukan Polhut Tingkat Ahli, diklat ini tidak jadi dilaksanakan karena adanya Refocusing Anggaran akibat pandemi Covid-19 tetapi pelaksanaannya sudah dalam tahap persiapan, direncanakan jumlah peserta sebanyak 69 orang dan anggaran yang telah digunakan dalam tahap persiapan adalah sebesar Rp12.235.000,-.

3) Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Diklat Fungsional Pedal yang dilaksanakan adalah : Pelatihan jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, kegiatan ini diadakan sebelum adanya Pandemi Covid-19 sehingga dilaksanakan secara klasikal dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang dan anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp188.739.000,-.

4) Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)

Adanya kebutuhan pelatihan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan di masa pandemi mengharuskan pelatihan dilaksanakan secara jarak jauh (E-Learning) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dan anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp74.000.000,-

5) Rakor Diklat Fungsional

Kegiatan ini merupakan rapat koordinasi sinkronisasi data dengan seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani pelatihan fungsional terkait kebutuhan pelatihan fungsional Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM LHKI 34 untuk tahun 2021. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp8.020.000,-.

6) SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks permasalahannya, perlu dukungan SDM yang profesional sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan. SDM yang diperlukan adalah yang menguasai dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kemampuan manajemen yang baik dalam pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mencapai hal di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pengelolaan pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur Lingkungan Hidup dan kehutanan di perguruan tinggi. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan adanya Refocusing Anggaran terjadi penurunan target output dari target awal sebelumnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

(a) Pendidikan Magister (S-2)

Pendidikan Pasca Sarjana S-2 bagi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran Pusdiklat SDM LHK seluruhnya untuk pendidikan di dalam negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkualifikasi pendidikan S-2. Pendidikan program S-2 target lulusan tahun 2020 sebanyak 20 orang.



Anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 sebesar Rp2.094.330.000,-.

(b) Pendidikan Doktor (S-3)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan S-3. Pendidikan Doktor (S-3) target lulusan tahun 2020 sebanyak 3 orang. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dalam pagu tahun 2020 sebesar Rp488.601.000,- .

(c) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

Selain kegiatan akademis dan operasional karyasiswa sebagaimana di atas, dalam mendukung pendidikan Pasca Sarjana terdapat kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM LHK| 35 administrasi pengelolaan pendidikan pasca sarjana yang terdiri dari tes dan pendaftaran program pasca sarjana, presentasi lulusan karyasiswa, komisi pertimbangan pasca sarjana, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. Kegiatan ini juga diperuntukan bagi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor/donor/bantuan lembaga/instansi di dalam dan luar negeri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terkelolanya pendidikan pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada tahun 2020 dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu sebesar Rp289.509.000,-.

3. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi

a. Diklat Kepemimpinan

Pada tahun 2020 setelah adanya refocusing anggaran komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II diikuti oleh PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dan atau telah menduduki jabatan struktural Eselon II. Pada tahun 2020 direncanakan 6 orang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di LAN dan Badan Diklat Provinsi yang menyelenggarakan Diklat PIM II.

anggaran yang dialokasikan untuk biaya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan per orang sebesar Rp30.261.000,- sedangkan selebihnya adalah untuk koordinasi, konsultasi penyelenggaraan dengan LAN Pusat dan daerah serta instansi terkait sebesar Rp19.500.000,- sehingga total anggaran untuk Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dalam pagu tahun 2020 sebesar Rp201.066.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memiliki kompetensi/kemampuan kepemimpinan jenjang jabatan eselon II

2) **Workshop Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas.**

Workshop ini direncanakan diikuti oleh 30 orang widyaiswara yang berasal dari Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK, Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (a) Menambah wawasan dan keterampilan widyaiswara terkait substansi penyelenggaraan PKA dan PKP;
- (b) Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian tujuan PKA dan PKP;
- (c) Merumuskan solusi alternatif dari permasalahan/kendala dalam pencapaian tujuan PKA dan PKP. Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp68.850.000.

3) **Seminar Inovasi Diklat Kepemimpinan**

Atas dasar banyaknya inovasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Eselon III dan IV di lingkup Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, maka disusunlah kegiatan ini dengan tujuan :

- (a) Sebagai wadah untuk saling berbagi informasi, terkait pengalaman, kendala-kendala dalam berinovasi;
- (b) Menambah wawasan bagi peserta;
- (c) Mengidentifikasi kebutuhan inovasi di sektor publik;
- (d) Memberikan apresiasi kepada inovator

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp58.170.000,-

b. Diklat Administrasi

Pada tahun 2020 setelah adanya refocusing anggaran komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) **Pelatihan Training Officer Course (TOC) Sub Admin Pelatihan jarak jauh secara elektronik (Pelaksanaan Pelatihan dengan Metode E-learning)**
Pelatihan Training Officer Course Sub Admin adalah Pelatihan untuk penyelenggara pelatihan. Penyelenggara diklat dilatih memahami konsep dasar system diklat e-learning. Memahami konsep dasar tersebut akan meningkatkan Kompetensi penyelenggara diklat e-learning. Selain itu TOC juga merupakan bagian dari persyaratan akreditasi diklat. Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh 128 Orang peserta dengan biaya sebesar Rp36.335.000,-
- 2) **Pelatihan Kewidyaiswaraan berjenjang Tingkat Tinggi**
Salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan Pelatihan adalah Widyaiswara yang menjadi unjuk tombak pelatihan yang sesuai dengan tugas mendidik, mengajar dan membimbing PNS serta evaluasi umum. Widyaiswara akan langsung berinteraksi dengan peserta pelatihan melalui transfer audiensi dan kreasi, motivasi, fasilitasi, diskusi. Untuk itu profesionalisme widyaiswara menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat untuk naik jenjang menjadi widyaiswara utama adalah dengan mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan berjenjang Tingkat Tinggi. Target peserta untuk diklat ini adalah 30 Orang, dengan jumlah anggaran Rp187.980.000,-
- 3) **Pelatihan Training Of Trainer Substansi**
Pelatihan Training of Trainer Substansi adalah Pelatihan untuk Pelatih dilakukan secara e-learning. Definisi secara luasnya adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan bagi para calon pengajar/pelatih setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh 371 Orang peserta dengan biaya sebesar Rp215.850.000,-
- 4) **Pelatihan Strategi Komunikasi Untuk Promosi dan Pemasaran Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi**

- 5) Komunikasi merupakan faktor dalam menunjang kinerja dan citra lembaga. Seiring perkembangan teknologi dan media sosial, lembaga harus mampu memanfaatkannya tidak terkecuali Promosi Pemasaran Jasa Lingkungan Wisata Alam. Pelatihan ini direncanakan diikuti oleh 40 Orang peserta dengan biaya sebesar Rp30.700.000,-
- 6) Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian Latsar CPNS
Kegiatan Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian Latsar CPNS adalah untuk menunjang pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dimana dalam pelaksanaan pelatihan Latsar CPNS perlu ada Pedoman Evaluasi Penilaian Latsar CPNS Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp38.150.000,-
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
Kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk melakukan koordinasi terkait pelatihan yang dilaksanakan Pusat Diklat SDM LHK, BDLHK maupun Instansi lainnya yang melakukan kerjasama dengan Pusat Diklat SDM LHK anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp53.949.000,-.

4. Layanan Program dan Umum

a. Program

1) Pembuatan Renja, Renstra dan Monitoring IKK

Rencana Kerja (Renja) dibuat setiap tahun yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan menyeluruh mengenai perencanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana kerja wajib disusun oleh suatu instansi/lembaga sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2020 disusun juga Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan Pusdiklat SDM LHK yang memuat target capaian IKK. Monitoring IKK perlu dilaksanakan guna memonitor perkembangan pencapaian IKK. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar Rp 75.615.000,-.

2) Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, perlu disusun dokumen perencanaan yaitu Perencanaan dan Penyusunan Program Anggaran (RKAKL/DIPA). Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Kegiatan perencanaan dan penyusunan program anggaran ini terdiri dari kegiatan konsultasi/koordinasi anggaran, menghadiri rapat-rapat terkait anggaran, pelaksanaan revisi anggaran tahun 2020 di tingkat Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dan revisi tingkat DJA serta penyusunan anggaran tahun 2021. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp131.661.000,-.

3) Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015

Penerapan kegiatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dimaksudkan agar Pusdiklat SDM LHK dapat menyelenggarakan diklat dengan lebih baik, melalui prinsip : komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp33.543.000,-.

4) Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015

Penerapan kegiatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dimaksudkan agar Pusdiklat SDM LHK dapat menyelenggarakan diklat dengan lebih baik, melalui prinsip : komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan. Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan pemeliharaan dan penerapan ISO 9001;2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp20.000.000,-.

a. Kepegawaian

1) Kepegawaian

Dalam rangka menunjang administrasi kepegawaian dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara Pusat Diklat SDM LHK diperlukan anggaran untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Penyusunan mutasi/administrasi kepegawaian (formasi, kenaikan pangkat, jabatan, laporan-laporan kepegawaian Triwulan 1, 2, 3, dan 4 semester 1, 2 dan tahunan), pembelian ATK, pembinaan/supervisi/ koordinasi pendidikan dan kediklatan serta mengikuti rapat-rapat/konsultasi. Anggaran yang disediakan dalam pagu tahun 2020 untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp57.480.000,-

2) Kewidyaiswaraan

Salah satu faktor untuk menjadi lembaga diklat yang berkualitas adalah tersedianya Widyaiswara yang kompeten dalam meng ampu mata diklat. Untuk itu perlu ditunjang dengan pelayanan kesekretariatan Widyaiswara

serta pengembangan profesi. Kebutuhan Kesekretariatan widyaiswara antara lain adalah pembelian ATK dan bahan operasional komputer, fotocopy, biaya rapatrapat, sedangkan untuk pengembangan profesi antara lain penelaahan DUPAK, penyusunan tabulasi angka kredit jabatan fungsional widyaiswara, penelitian kediklatan dll. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp166.676.000

3) Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi dan pengetahuan pegawai Pusat Diklat SDM LHK harus selalu ditingkatkan kualitasnya sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai adalah dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi, dan seleksi widyaiswara. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pagu APBN tahun 2020 adalah sebesar Rp35.000.000,-.

4) Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Diklat/ Kerjasama Diklat

Dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kediklatan, pengembangan kerja sama kediklatan, dan juga melaksanakan fungsi sebagai Pembina teknis kediklatan, serta pengelolaan KHDTK kepada BDLHK bagi pimpinan pada tahun 2020 telah disediakan anggaran sebesar Rp424.779.000

5) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kediklatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pegawai terutama pengampu pelatihan dalam meningkatkan kapasitasnya seperti pembiayaan penelitian hingga penerbitan jurnal. Adapun kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp28.000.000,-

b. Umum

1) Ketatausahaan/BMN/Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan kediklatan dan operasional perkantoran diperlukan anggaran untuk membiayai kegiatan Ketatausahaan/BMN/Keuangan. Kegiatan tersebut digunakan untuk operasional perpustakaan, rapat-rapat pembahasan serta koordinasi/

konsultasi ketatausahaan/BMN/Keuangan. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp108.100.000,-.

2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

(a) Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan

Dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana prasarana Pusdiklat SDM LHK pada Tahun 2020 dianggarkan kegiatan Renovasi Gedung kantor dan perpustakaan serta Renovasi ruang transit Kapusdiklat SDM LHK DI Blok IV Lt. 7 Gedung Manggala Wanabakti.. Pada Tahun 2020, terjadi bencana pandemic Corona virus Disease-2019 (COVID-19) yang melanda dunia dan juga Indonesia yang membawa resiko bagi Kesehatan dan menimbulkan korban jiwa. Adanya situasi tersebut Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyesuaian kegiatan dimana banyak kegiatan yang mengalami penghematan adapun kegiatan yang mengalami penghematan diantaranya adalah Renovasi Gedung Perkantoran dan Asrama untuk kegiatan Pengawasan dan Fisik sedangkan Perencanaan dan Pengelolaan sudah dilaksanakan, serta kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan adalah Renovasi Ruang Transit Kapusdiklat Blok IV Lt.7 Gedung Manggala Wanabakti. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp200.000.000

(b) Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi

Di masa pandemic Covid-19 dimana sebagian besar kegiatan kediklatan dan rapat-rapat dilakukan secara online. Kondisi seperti ini diperlukan fasilitas penunjang salah satunya adalah laptop. Menurut catatan BMN, Pusdiklat SDM LHK pada saat ini mempunyai 43 unit laptop, dengan kondisi rusak berat sebanyak 24 unit dan dalam kondisi baik sebanyak 19 unit. Pengadaan ini bertujuan untuk menggantikan laptop yang dalam kondisi rusak berat pada daftar inventarisasi BMN. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp425.000.000,-.



3) **Pembayaran gaji dan tunjangan (gaji, TPPK)**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak dari 107 orang pegawai PNS atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp14.612.079.000,-.

4) **Operasional Perkantoran**

Kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan layanan perkantoran (langganan koran dan majalah, biaya operasional asrama, gaji petugas pramu bakti/teknisi/satpam, pengemudi, honor pengelola kegiatan, langganan internet, fotocopy, Fotocopy penggandaan dan penjilidan, biaya rapat-rapat, jasa pos dan giro, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan listrik, langganan telepon, air dan gas pengadaan masker non-medis (kain) bagi karyawan, pengadaan Hand Sanitizer, langganan aplikasi teleconference). Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp3.338.552.000,-.

5) **Honor Pengelola Keuangan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan hak dari pengelola anggaran antara lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Uang Persediaan, Pengelola SAI dan BMN, Pengelola PNBPN, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang. Anggaran dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp278.980.000

6) **Perawatan Sarana Perkantoran**

Kegiatan ini terkait dengan biaya operasional dan perbaikan peralatan kantor berupa AC Split, Pompa air, Mesin potong rumput, Personal Computer, Peralatan meubeler, Peralatan Fitness, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan LCD Projector, Peralatan Karaoke, Genset, Pemeliharaan Inventaris kantor, sehingga perangkat kerja dimaksud dapat berfungsi dan layak digunakan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp199.618.000,-.

7) **Perawatan Kendaraan**

Kendaraan merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sangat diperlukan keberadaannya. Oleh karenanya agar dapat tetap berfungsi dengan optimal perlu dilakukan pemeliharaan dengan

kegiatan berupa perbaikan, rehabilitasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penyediaan bahan bakar. Perawatan meliputi: kendaraan pejabat Eselon II, kendaraan operasional roda-4, pemeliharaan kendaraan operasional roda-2, biaya pemeliharaan dan operasional Kendaraan Roda 6 serta biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional lapangan (double gardan). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp530.330.000,-

8) Perawatan Gedung

Kegiatan ini terkait dengan biaya perawatan gedung agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsinya yang terdiri dari : pemeliharaan gedung/ bangunan kantor bertingkat, pemeliharaan jaringan listrik, telepon, PAM dan gas, pemeliharaan jaringan LAN dan Internet. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp1.701.544.000,-.

9) Pengadaan Peralatan Asrama dan Dapur

Salah satu sarana penunjang kegiatan diklat adalah kenyamanan bagi peserta diklat sehingga para peserta diklat dapat melaksanakan diklat dengan baik. Salah satu upaya tersebut adalah berupa pengadaan sprei, bed cover dan peralatan dapur dan asrama. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp44.875.000,-.

10) Penambah Daya Tahan Tubuh

Dalam masa darurat nasional akibat Pandemi COVID-19 semua PNS dan PPNP mendapat penambah daya tahan tubuh untuk menambah imun tubuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaan bentuknya adalah madu, susu dan suplemen makanan lain seperti vitamin. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 52.022.000,-.

11) Kegiatan Pendukung Kediklatan dalam Masa Darurat Covid-19

Pemerintah telah menetapkan status darurat nasional akibat Pandemi Covid-19, dalam masa darurat tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor

SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana salah satu kebijakannya adalah adanya pengaturan kerja bagi ASN dimana sebagian bisa bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan sebagian ASN yang piket kerja secara bergiliran dengan tetap melaksanakan kerja dari kantor (*Work From Office*) dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-308/PB/2020 Tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19 dijelaskan bahwa untuk ASN yang melaksanakan pekerjaan dari kantor (WFO) bisa diberikan bantuan transport dan juga uang makan sesuai standar biaya masukan tahun 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut Pusat Diklat SDM LHK telah mengalokasikan bantuan transport dan uang makan bagi ASN yang melakukan WFO sebesar Rp305.225.000,-.

- 12) Rumah Tangga, Perlengkapan dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan
Dalam pelaksanaan kegiatan kediklatan diperlukan dukungan sarana dan prasarana penunjang diklat. Adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta belanja operasional dengan anggaran sebesar Rp962.650.000,-

Dari total alokasi DIPA BA.29 unit Badan P2SDM TA. 2020 tersebut, alokasi pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan diklat dan kependidikan sebesar Rp.40.469.312.000,- terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp. 35.826.053.000,- atau sebesar 88,53%, PNP sebesar Rp. 1.860.000.000,- atau sebesar 4,60%, dan sumber dana jenis belanja HLN sebesar Rp. 2.783.259.000,- atau sebesar 6,88%.Perincian alokasi per jenis belanja dan Rencana Kinerja Pusdiklat SDM LHK TA. 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 6, 7 dan 8.



Tabel 6. Perincian Jenis Belanja DIPA BA.29 Pusdiklat SDM LHK TA.2020

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	14.205.161.466,-	35,10
52	Belanja Barang	25.639.150.534,-	63,35
53	Belanja Modal	625.000.000,-	1,55
TOTAL		40.469.312.000,-	100.00

Tabel 7. Perincian Sumber Dana DIPA BA. 29 Pusdiklat SDM LHK TA. 2020

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Persentase (%)
1	RM	35.826.053.000,-	88,53
2	PNP	1.860.000.000,-	4,60
3	HLN	2.783.259.000,-	6,88
TOTAL		40.469.312.000,-	100.00



Tabel 8. Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Volume Satuan	Pagu Anggaran(Rp)
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK		17.817.982.000,-
5441.001	SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	4.838 Orang	14.845.542.000,-
5441.002	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	23 Orang	2.782.440.000,-
5441.003	Nilai KHDTK yang dikelola	66,5 poin	100.000.000,-
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		
5439.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	882.980.000,-
5439.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	625.000.000,-
5441.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.758.000.000,-
5442	Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Tersedia	466 Orang	385.350.000,-
TOTAL			40.469.312.000,-

D. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020

Perjanjian kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penetapan Kinerja, istilah penetapan kinerja telah diubah menjadi perjanjian kinerja.



Tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya DIPA 029 Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020 dengan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400210/2020 tanggal 10 Desember 2020 telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020 antara Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan November 2019 kemudian Revisi Perjanjian Kinerja antara Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan September Tahun 2020, sebagaimana Lampiran 2.

E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 8 sasaran, dimana dari sasaran tersebut terdapat 2 kegiatan dengan 6 indikator kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan dimaksud merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja suatu instansi pemerintah.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Pusat Diklat SDM LHK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan diklat administrasi, diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan kependidikan lingkup kementerian LHK. IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2020

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2020-2024		Target 2020	
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a.	Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	35.000	Orang	9.617	Orang
		b.	Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	225	Orang	23	Orang
		c.	Nilai KHDTK yang dikelola	70	Poin	66,5	Poin
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (K3)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan		2.364	Orang	466	Orang



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Review terhadap Dokumen Perencanaan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kualitas dan kuantitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi operasionalisasi kebijakan tersebut di atas, maka kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas aparatur dan pihak-pihak lain (*stake holder*) yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Peningkatan profesionalisme aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui proses diklat lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat memenuhi kebutuhan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan yang memiliki kemampuan teknis, kepemimpinan, komitmen dan moralitas yang tinggi serta meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kerjasama di dalam melaksanakan pekerjaan atau penyelenggaraan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, disamping guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Pagu anggaran awal yang diberikan kepada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.40.070.484.000,-. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka anggaran Pusat Diklat SDM LHK melakukan refocusing anggaran yang mengakibatkan pemotongan anggaran menjadi 34.209.312.000,- dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan melalui Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Pada Bulan Agustus 2020 pemerintah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional, selain penanganan ada masalah kesehatan nasional. Salah satu kegiatan kehutanan potensial untuk

membantu meningkatkan ekonomi masyarakat adalah pengembangan agroforestry. Dalam hal ini Pusat Diklat SDM LHK memberikan dukungan dalam pelatihan agroforestry dan pendampingan kelompok. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pusat Diklat SDM LHK mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp6.260.000.000,- sehingga anggaran menjadi Rp40.469.312.000,-.

Dengan adanya penambahan pagu anggaran tersebut maka disusunlah kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020.

Kronologis revisi anggaran DIPA APBN Pusat Diklat SDM LHK Perincian Jenis Belanja DIPA BA. 29 Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 serta Revisi Rencana anggaran berdasarkan sumber dana dan Revisi anggaran berdasarkan kegiatan sebagaimana Tabel 10, 11 dan 12.

Tabel 10. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN dan APBN-P Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020

No.	URAIAN	PAGU	NOMOR PENGESAHAN
1	DIPA APBN	45,070,484,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 12 November 2019
2	REVISI-1	45,070,484,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 13 Februari 2020
3	REVISI-2 DJA (REFOCUSING ANGGARAN)	34,209,312,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 27 April 2020
4	REVISI-3	34,209,312,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 02 Juli 2020
5	REVISI-4 DJA (PENGADAAN LAPTOP)	34,209,312,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 20 Juli 2020
6	REVISI-5 DJA (PEN)	40,469,312,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 10 September 2020
7	REVISI-6	40,469,312,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 29 September 2020
8	REVISI-7 DIT. PA (REALOKASI BELANJA PEGAWAI)	40,469,312,000	SP DIPA-029.08.1.400210/2020 tanggal 09 November 2020
9	REVISI-8	40,469,312,000	SP DIPA-029.08.1.400210/2020 tanggal 01 Desember 2020

No.	URAIAN	PAGU	NOMOR PENGESAHAN
10	REVISI-9	40,469,312,000	SP DIPA-029.08.1.400210/2020 tanggal 28 Desember 2020



Tabel 11. Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Pusat Diklat SDM LHK TA. 2020

No.	Tanggal Pengesahan	Pagu Semula (Rp)				Pagu Menjadi (Rp)			
		RM	PNP	HLN	JUMLAH	RM	PNP	HLN	JUMLAH
1	APBN SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 12 November 2019	40.427.225	1.860.000	2.783.259	45.070.484	40.427.225	1.860.000	2.783.259	45.070.484
2	REV-1 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 13 Februari 2020	40.427.225	1.860.000	2.783.259	45.070.484	40.427.225	1.860.000	2.783.259	45.070.484
3	REV-2 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 27 April 2020	40.427.225	1.860.000	2.783.259	45.070.484	29.566.053	1.860.000	2.783.259	34.209.312
4	REV-3 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 02 Juli 2020	29.566.053	1.860.000	2.783.259	34.209.312	29.566.053	1.860.000	2.783.259	34.209.312
5	REV-4 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 20 Juli 2020	29.566.053	1.860.000	2.783.259	34.209.312	29.566.053	1.860.000	2.783.259	34.209.312
6	REV-5 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 10 September 2020	29.566.053	1.860.000	2.783.259	34.209.312	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312



7	REV-6 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 29 September 2020	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312
8	REV-7 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 09 November 2020	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312
9	REV-8 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 01 Desember 2020	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312
10	REV-9 SP DIPA - 029.08.1.400210/2020 tanggal 28 Desember 2020	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312	35.826.053	1.860.000	2.783.259	40.469.312



Tabel 12. Rincian Anggaran APBN-P pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Akun Tahun 2020 (Satker Pusat Diklat SDM LHK 400210)

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Penambahan
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		
5439.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.023.295.000,-	882.980.000,-
5439.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.000.000.000,-	625.000.000,-
5439.994	Layanan Perkantoran	20.758.000.000,-	20.758.000.000,-
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK		
5441.001	SDM Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	14.463.839.000,-	14.845.542.000,-
5441.002	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	4.500.000.000,-	2.872.440.000,-
5441.003	Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	100.000.000,-	100.000.000,-
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	3.225.350.000,-	385.350.000,-
TOTAL		45.070.484.000,-	40.469.312.000,-

2. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada Tahun 2019

Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal tidak melakukan Reviu terhadap hasil audit dan tidak melakukan audit kinerja pada satker Pusat Diklat SDM LHK, maka audit terhadap Pusat Diklat SDM LHK di tahun 2019 sesuai dengan hasil berita acara tanggal 1 November 2019 di Jakarta bahwa rekomendasi atas laporan hasil audit (LHA) Inspektorat Jenderal KLHK pada satker Pusat Diklat SDM LHK dengan catatan Nihil yang tertandatangani dari Inspektorat Jenderal KLHK dan Pusat Diklat SDM LHK.

3. Metode Pengukuran



Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang penilaian capaian visi dan misi, dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja, meliputi kinerja fisik, kinerja keuangan, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja.

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan capaian rencana dan/atau keberhasilan capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengukuran Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan Pengukuran Capaian Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap capaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

Berdasarkan pembatasan terhadap tingkat capaian kinerja yang telah disepakati oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminimalisir adanya bias dalam penghitungan capaian kinerja sasaran, khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 150%, diasumsikan capaiannya maksimal hanya sebesar 150%.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu juga,

evaluasi dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi capaian dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan apabila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Implementasi pelaksanaan kegiatan Pusat Diklat SDM LHK sesuai nomenklatur dokumen perencanaan terakomodir dalam kegiatan dukungan penyelenggaraan diklat dan pelaksanaan tugas lainnya pada Pusat Diklat SDM LHK. Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Dalam hal pengukuran capaian kinerja, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kriteria capaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika capaiannya melebihi 90%. Berdasarkan kriteria tersebut, maka capaian indikator kinerja Pusat Diklat SDM LHK untuk kegiatan indikator kinerja pada kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK sebesar 101,71%, untuk lulusan Pendidikan S2 dan S3 sebesar 73,91%, Pengelolaan KHDTK sebesar 100%, dan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan 100%, masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan.

Pada Tahun anggaran 2020, Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan yang akan dicapai, yaitu penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur SDM LHK dan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan



kehutanan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelambatan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi di tingkat tapak termasuk KTH Perhutanan Sosial.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. PEN merupakan respon pemerintah selain penanganan krisis kesehatan, atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.

Strategi utama Perhutanan Sosial meliputi dua hal, yakni [1] Pemberian Akses Kelola Program Perhutanan Sosial, dan [2] Peningkatan kapasitas Usaha Pogram Perhutanan Sosial. Oleh karena itu diperlukan program pendampingan untuk mencapai 2 hal tersebut, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan KTH maupun pemberian bimbingan teknis kepada KTH.

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di bidang peningkatan ketahanan pangan nasional terpadu serta menunjang kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tenaga pendamping untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani pemegang ijin perhutanan sosial.

Melihat kondisi tersebut, Badan P2SDM melalui Pusat Diklat SDM LHK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pendamping kelompok penerima akses perhutanan sosial dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

b. Efektivitas Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran/*outcome* Tahun 2020 tidak dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2019, hal ini dikarenakan



indikator kinerja kegiatan Tahun 2020 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2020-2024.

Cara penilaian efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2020.

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya}}$$

Rasio yang dihasilkan > 1 terjadi peningkatan. Apabila rasio yang dihasilkan = 1 maka efektifitas capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan efektifitas capaian kinerja sasaran yang menurun, sehingga perlu adanya percepatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang yang dirumuskan dalam Renja/RKT, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode Renstra.

Tabel 13. Efektifitas Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi Fisik 2020	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	101,71	Efektif
		SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa	73,91	Efektif
		Nilai KHDTK yang dikelola	100	Efektif
2.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kehutanan yang tersedia	100	Efektif

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2020 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2020. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2020.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja keuangan tahun berjalan}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk katagori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , maka capaian kinerja sasaran termasuk kategori kurang efisien. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi fisik 2019	% Realisasi Anggaran 2019	Efisiensi Kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	101,71	97,62	1,04	Efisien
		SDM LHK yang lulus pendidikan	73,91	99,92	0,74	Kurang Efisien
		Nilai KHDTK yang dikelola	100	99,84	1,00	Efisien
2.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kehutanan yang tersedia	100	99,91	1,00	Efisien
Rata-rata					0,95	Kurang Efisien

Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK memiliki rasio efisiensi dengan status kurang efisien, hal ini dikarenakan salah satu IKK ada yang tidak mencapai target yaitu SDM LHK yang lulus pendidikan karyawan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perguruan tinggi juga mengubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh dan mengakibatkan terhambatnya kelulusan karyawan diakibatkan karyawan yang hendak mengambil data untuk penyusunan Tesis dan Disertasi.

d. Rasio realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang ada pada renstra Pusat Diklat SDM LHK menunjukkan bahwa realisasi belum terpenuhi sesuai yang ditargetkan, hal ini dikarenakan

Rencana Kinerja Tahunan ini baru merupakan tahun pertama penjabaran Rencana Strategis Tahun 2020-2024, namun realisasi kegiatan SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya sudah sudah melebihi dari target Renja.. Secara rinci rasio/perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah disajikan sebagaimana Tabel 15.

Tabel 15. Rasio realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 untuk target jangka menengah.

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra 2020-2024	Rencana					Realisasi 2020	% Capaian Kinerja	
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	a Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	56.150 Orang	9.617 Orang	11.461 Orang	11.461 Orang	11.461 Orang	12.150 Orang	9.781	101,71
		b Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	225 Orang	23 orang	45 orang	45 orang	45 orang	67 orang	17	73,91
		c Nilai KHDTK yang dikelola	70 poin	66,5 poin	67 poin	68 poin	69 poin	70 poin	66,5	100
2	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (K3)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	2.364 Orang	466 orang	473 orang	473 orang	473 orang	473 orang	466	100

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 pada Pusat Diklat SDM LHK dilakukan untuk seluruh hasil kegiatan pada penetapan kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 dan tertuang dalam dokumen RKA-KL Satuan Kerja Pusat



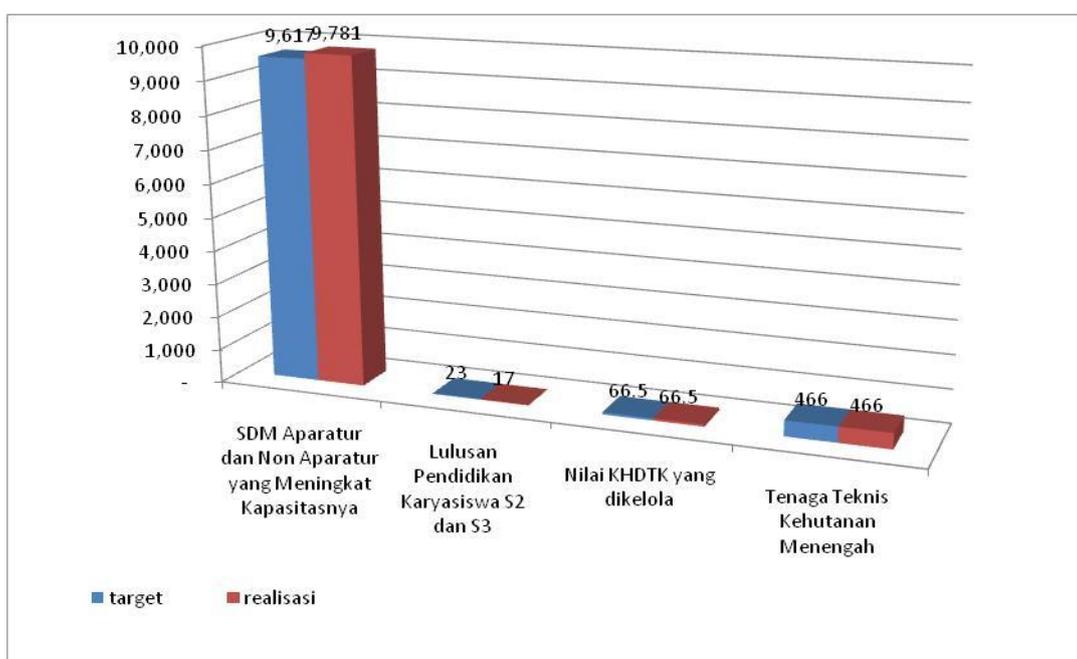
Diklat SDM LHK Tahun 2019 mencakup output kegiatan. Pada Tahun 2020 Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

Kegiatan tersebut dicapai melalui 5 (lima) Indikator kinerja, yaitu:

- 1) SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya;
- 2) SDM LHK yang lulus pendidikan karyawan S2 dan S3;
- 3) Nilai KHDTK yang dikelola; dan
- 4) Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja pada indikator kinerja lingkup Pusat Diklat SDM LHK (termasuk BDLHK dan SMKK) dijelaskan pada Lampiran 3.



Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja Pusat Diklat SDM LHK dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK

a. SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang Meningkatkan Kapasitasnya

SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya merupakan salah satu tugas pokok dari Pusat Diklat SDM LHK melalui penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur yang terdiri dari:

- 1) Diklat Kepemimpinan;
- 2) Diklat Administrasi;
- 3) Diklat Teknis; dan
- 4) Diklat Fungsional.

Maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2020. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai Tabel 16.

Tabel 16. Target dan Realisasi Jenis Diklat di Pusat Diklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	% Persentase
1	Diklat Kepemimpinan	6	6	100
2	Diklat Administrasi	586	591	100,85
3	Diklat Fungsional	352	352	100
4	Diklat Teknis	3.894	4.040	103,79
Jumlah		4.838	4.989	103,12

Hasil capaian indikator kinerja kegiatan adalah jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebesar 4.989 orang.

Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat administrasi, diklat teknis dan diklat fungsional merupakan implementasi upaya peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur guna mendukung pembangunan nasional tahun 2020-2024.

Realisasi penyelenggaraan diklat Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK pada tahun 2020 sebanyak 9.781 orang dari target 9.617 orang dengan persentase 101,71%, untuk Pusat Diklat SDM LHK sebesar 1.596 orang terdiri dari kepemimpinan 6 orang, diklat administrasi 591 orang, diklat fungsional 532 dan diklat fungsional 4.040 orang. Dengan rincian diklat sebagai berikut:

- Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II diikuti oleh PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dan atau telah menduduki jabatan struktural



Eselon II. Pada tahun 2020 direncanakan 6 orang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di LAN dan Badan Diklat Provinsi yang menyelenggarakan Diklat PIM II, dengan realisasi peserta sebanyak 6 orang (100%).

Anggaran yang dialokasikan untuk biaya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan per orang sebesar Rp30.261.000,- sedangkan selebihnya adalah untuk koordinasi, konsultasi penyelenggaraan dengan LAN Pusat dan daerah serta instansi terkait sebesar Rp19.500.000,- sehingga total anggaran untuk Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dalam pagu tahun 2020 sebesar Rp201.066.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memiliki kompetensi/ kemampuan kepemimpinan jenjang jabatan eselon II.

- Terselenggaranya Diklat Administrasi pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 591 orang peserta dari target 586 orang dengan persentase 100,85%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya aparatur lingkungan hidup dan kehutanan, yang mampu melaksanakan tugas merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan diklat di bidang administrasi. Rincian penyelenggaraan diklat administrasi sebagai Tabel 17.

Tabel 17. Target dan Realisasi Diklat Administrasi Lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
1	ToC Sub Admin Pelaksana Pelatihan Jarak Jauh	2	138	90	52	142	E-learning
2	Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi	10	30	30	0	30	E-learning
3	ToT Substansi Pelatihan	2	378	255	124	379	E-learning
4	Pelatihan Strategi Komunikasi untuk promosi dan pemasaran jasa lingkungan wisata	5	40	40	0	40	E-learning

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah			Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi		
				Lk	Pr	
	alam di kawasan konservasi					

- Terselenggaranya Diklat Fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 352 orang dari target 352 orang dengan persentase 100%, Diklat fungsional bertujuan untuk memenuhi kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Rincian penyelenggaraan diklat fungsional sebagaimana tercantum dalam Tabel 18.

Tabel 18. Target dan Realisasi Diklat Fungsional lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah			Keterangan	
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr		Jml
1	Pembentukan Pengendalian Dampak Lingkungan (PEDAL) 3 Angkatan	5	100	35	65	100	Ang 1 : Klasikal Ang 2 : E-learning
2	Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) 5 Angkatan	5	188	149	39	188	Ang 1 dan 2 : Klasikal Ang 3, 4 dan 5 : E-learning
3	Penjenjangan Fungsional PEH Ahli Jenjang Madya, 2 Angkatan	5	64	64	0	64	E-learning

- Terselenggaranya Diklat Teknis bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 4.040 orang dari target 3.894 orang dengan persentase 103,79%, Diklat fungsional bertujuan untuk memenuhi kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Rincian penyelenggaraan diklat fungsional sebagaimana tercantum dalam Tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi Diklat Teknis lingkup Pusdiklat SDM LHK



No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Keterangan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
1	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Izin 16 Angkatan		482	403	79	482	
2	Pelatihan Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum secara elektronik		86	153	0	153	
3	Pelatihan analisis neraca air sebagai dasar mitigasi bencana alam dan rehabilitasi lahan		198	198	0	198	
4	Pelatihan pemetaan partisipatif berbasis digital bagi program TORA secara elektronik		116	113	0	113	
5	Pelatihan Aplikasi GNSS untuk survey dan pemetaan		115	80	33	113	
6	Pendamping Ketahanan Agroforestry		93	93	0	93	
7	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial (Agroforestry)		2.665	2.752	0	2.752	
8	Pelatihan Penggunaan Drone untuk		79	70	6	76	



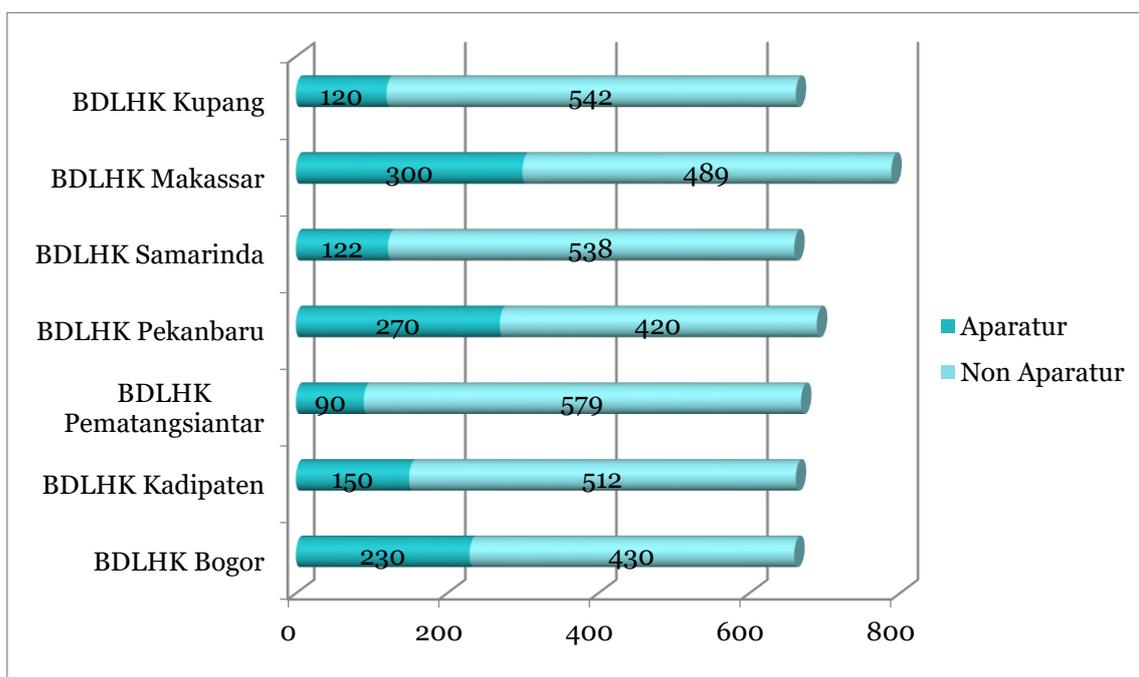
No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah			Keterangan
			Rencana	Realisasi		
				Lk	Pr	
	bidang LHK 4 Angkatan					
9	Pelatihan Teknik Pemanfaatan Pengolahan Madu Sutera		30	30	0	30
10	Pelatihan Penanganan Pasca Panen Pemasaran HHBK Kemiri		30	30	0	30

Capaian kinerja kegiatan SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya lingkup Pusat Diklat SDM LHK sudah tercapai sesuai penetapan kinerja sebagaimana Tabel 20.

Tabel 20. Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2020-2024	Target Kinerja 2020	Realisasi Kinerja 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	4.838 orang	4.989 orang
		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	23 orang	17 orang
		Nilai KHDTK yang dikelola	66,5 poin	66,5 poin
2.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	466 orang	466 orang

Sebaran jumlah peserta pelaksanaan pelatihan Pusdiklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK tahun 2020 yaitu:



Gambar 4. Sebaran Pelaksanaan Pelatihan di Pusat Diklat SDM LHK dan BDI HK Tahun 2020

Keberhasilan tercapainya jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya didukung oleh :

- Ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai;
- Sumber daya manusia (widyaiswara dan pengelola diklat yang profesional dan kompeten);
- Anggaran yang memadai;
- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan yang direncanakan.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan diklat telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan walaupun pelaksanaan diklat terkendala oleh situasi pandemi COVID-19. Kebijakan dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan mengubah metode pembelajaran dari klasikal menjadi metode jarak jauh (e-learning) membuat kinerja Pusat Diklat SDM LHK tetap terkendali.

Upaya tindak lanjut dengan melaksanakan diklat-diklat kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Lembaga Diklat Swasta dan lembaga lainnya.

Efektifitas capaian kinerja kegiatan SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya tahun 2020 tidak dapat dihitung dan dibandingkan karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024 dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berbeda.

Output indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebanyak 4.989 orang melalui kegiatan diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan administrasi bagi aparatur dan non aparatur LHK dengan outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karyasiswa S2 dan S3

Pendidikan lanjutan bagi S2 dan S3 merupakan kebijakan dari Kementerian LHK untuk meningkatkan profesionalisme bagi aparatur SDM KLHK. Maksud dilaksanakannya kegiatan pendidikan S2 dan S3 untuk menghasilkan aparatur yang memiliki kapasitas peningkatan pengetahuannya dalam mengemban tugasnya di KLHK.

Output dari indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3).

1) Terwujudnya lulusan pendidikan karya siswa (S2 dan S3).

Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai implementasi dalam meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kehutanan.

Untuk mencapai hal di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pengelolaan pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur Lingkungan Hidup dan kehutanan di perguruan tinggi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Pasca Sarjana.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

a) Pendidikan Magister (S-2)



Pendidikan Pasca Sarjana S-2 bagi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruhnya untuk pendidikan di dalam negeri dengan target lulusan pada Tahun 2020 sebanyak 25 orang.

Hasil kegiatan ini adalah Bertambahnya pengetahuan & kemampuan pegawai kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-2.. Keluarannya adalah Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-2.

b) Pendidikan Doktor (S-3)

Pendidikan Doktor (S-3) target lulusan tahun 2020 sebanyak 5 orang. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dalam pagu APBN-P untuk kegiatan Tahun ketiga dan Tahun keempat pendidikan program S-3 dalam negeri pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan S-3. Hasil kegiatan tersebut adalah bertambahnya pengetahuan dan kemampuan pegawai Kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-3. Keluarannya adalah Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-3.

Kegiatan SDM KLHK yang lulus pendidikan karyasiswa S2 dan S3 sebanyak 17 orang dari target 23 orang (73,91%). Tidak tercapainya target ini dikarenakan saat munculnya pandemi COVID-19, metode pembelajaran pada perguruan tinggi menjadi pembelajaran jarak jauh dan karyasiswa yang harus melaksanakan penelitian harus ditunda sampai pandemi mereda sehingga berakibat pada mundurnya jadwal penelitian, penyusunan tesis/disertasi dan kelulusan.

Presentasi hasil karya studi program S3 dilakukan secara virtual dengan menggunakan webinar meeting untuk mengurangi dampak COVID-19 dengan menjaga jarak.





Gambar 3. Presentasi Hasil Studi Karyasiswa untuk Program Doktor (S3)

Keberhasilan tercapainya jumlah pendidikan karyasiswa S2 dan S3 didukung oleh koordinasi/konsultasi yang efektif dengan para pihak, diantaranya Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, serta Sekretariat Badan/Itjen/Ditjen lingkup KLHK.

Kendala berupa adanya keterlambatan karya siswa dalam menyelesaikan studi yang disebabkan oleh faktor individu (keluarga atau diri pribadi) maupun faktor luar/lingkungan.

Upaya tindak lanjut dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke perguruan tinggi, melakukan pemantauan database dengan tindak lanjut menghubungi bersangkutan yang telah mencapai waktu lulus, memberikan surat tanggapan terhadap pelaporan kemajuan studi dan *coaching clinic* serta *workshop* bagi karya siswa yang diselenggarakan untuk mempertemukan dan membangun komitmen para pihak dalam penyelesaian tugas belajar S2 dan S3 KLHK serta keefektifan dalam monitoring dan evaluasi.

Efektifitas capaian kinerja kegiatan SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa tahun 2020 tidak dapat dihitung dan dibandingkan karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024 dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berbeda.

Sedangkan efisiensi capaian kinerjanya rasio yang dihasilkan sebesar 0,74 dengan kategori kurang efisien, hal ini dikarenakan saat munculnya pandemi COVID-19, metode pembelajaran pada perguruan tinggi menjadi pembelajaran jarak jauh dan karyasiswa yang harus melaksanakan penelitian harus ditunda sampai pandemi mereda sehingga berakibat pada mundurnya jadwal penelitian, penyusunan tesis/disertasi dan kelulusan.

Output indikator kinerja kegiatan yang mendukung lulusan S2 dan S3 sebanyak 23 orang melalui pendidikan lanjutan LHK di beberapa Perguruan Tinggi dengan outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pegawai Kementerian LHK yang bertambah kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dalam mendukung pembangunan LHK.

c. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

Hutan Diklat merupakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan diklat, sesuai peraturan nomor 12 tahun 2010 tentang penelitian dan pengembangan serta diklat kehutanan. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) diperuntukkan sebagai sarana praktek diklat dalam mendukung penyelenggaraan diklat yang berkualitas.

Pada Tahun 2019 Badan P2SDM telah berhasil memfasilitasi pengelolaan KHDTK sebanyak 7 unit dari target 7 unit atau dengan capaian sebesar 100%. Adapun lokasi KHDTK yang menjadi indikator kinerja berada di :

- 1) BDLHK Bogor: Operasional hutan diklat, Pemeliharaan demplot, Pemeliharaan arboretum, Pemeliharaan pal batas kawasan, Pengamanan



Kawasan, Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan di KHDTK, Penanaman di KHDTK.

- 2) BDLHK Kadipaten: Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan KHDTK Tahun 2020-2024, Demplot, Model, Lokasi Praktik, Petak Pemanfaatan, Instalasi pada KHDTK, Perlindungan KHDTK, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK.
- 3) BDLHK Kupang: Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK, Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat, Pengembangan Sarpras Kediklatan di KHDTK, Perlindungan Pengamanan dan Penyuluhan di KHDTK Hutan Diklat, Administrasi Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) BDLHK Makassar: Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KHDTK Tahun 2020, Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah KHDTK Tahun 2020-2024, Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK Tahun 2020-2039, Sarana Persuteraan Alam di Kampus Sudiang, Sarana Persemaian, Penyuluhan, Administrasi dan Pelaporan Kegiatan KHDTK, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pemeliharaan Peralatan, Pemeliharaan KHDTK.
- 5) BDLHK P.Siantar: Operasional KHDTK, Patroli Pengamanan KHDTK, Pemeliharaan Demplot, Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK.
- 6) BDLHK Pekanbaru: Kegiatan Rutin KHDTK Bukit Suligi, Pengelolaan KHDTK, Pemeliharaan Demplot, Perlindungan dan Pengamanan, Sosialisasi/Penyuluhan Masyarakat Sekitar KHDTK, Biaya Operasional Penyuluh, Operasional Persemaian, Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK Bukit Suligi.
- 7) BDLHK Samarinda: Rencana pengelolaan KHDTK Hutan Diklat, Pemeliharaan dan Operasional Persemaian, Perlindungan dan pengamanan, Administrasi dan Pelaporan, Operasional Penyuluhan Kehutanan.

Sejak tahun 2019 KHDTK masuk dalam program prioritas nasional bertujuan untuk mendukung Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) dalam kegiatan praktek siswa SMKK seperti persemaian, pembuatan demplot. Maksud pelaksanaan kegiatan KHDTK tersebut untuk memenuhi kepentingan penyelenggaraan diklat terutama sebagai sarana praktek diklat, dimana prinsip pengelolaan kawasan diklat tidak merubah fungsi hutan tersebut. Indikator kinerja



kegiatan nilai KHDTK yang dikelola merupakan penilaian pengelolaan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan aparatur dan non aparatur LHK.

Kriteria dan indikator pengelolaan KHDTK/ hutan diklat ini adalah acuan bagi evaluasi penilaian kinerja pengelolaan KHDTK/ Hutan Diklat.

Dengan tersusunnya kriteria dan indikator pengelolaan KHDTK/ hutan diklat ini diharapkan penyelenggaraan pengelolaan hutan diklat lebih optimal terarah, efisien, efektif, berhasil-guna dan berdaya-guna.

Pada Tahun 2020 Badan P2SDM juga turut mendukung perhitungan Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan, khususnya pada kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan diklat. Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus mengacu pada Peraturan Menteri LHK nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus. Secara perhitungan, Badan P2SDM akan menggunakan sistem skoring yang disusun melalui Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Tata Cara Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Saat ini peraturan tersebut sedang disusun oleh Pusat Diklat SDM LHK. **Selama proses penyusunan draft Perkabadan tersebut, BP2SDM telah mencoba melakukan perhitungan secara cepat menggunakan pedoman pada draft yang disusun dan menghasilkan angka baseline Tahun 2019 sebesar 66,15 poin, yang merupakan rerata dari indeks efektivitas 7 Balai Diklat LHK BP2SDM.**

Indeks nilai KHDTK yang dikelola yaitu 66,5 poin dari target 66,5 poin (100%0 yang merupakan nilai dari indikator penilaian Rencana Pengelolaan KHDTK.

Keberhasilan tercapainya kegiatan KHDTK didukung oleh:

- a. Terbentuknya kelompok tani Hutan (KTH).
- b. Pengembangan kelola usaha KTH yang dibina oleh pembina/penyuluh hutan Diklat.
- c. Hutan diklat relatif aman dari gangguan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.
- d. Hutan diklat digunakan sebagai sarana praktek/pendidikan lingkungan bagi siswa sekolah dan perguruan tinggi.
- e. Hutan diklat digunakan sebagai sarana wisata.

Pada tahun 2020 terjadi **kendala** kurang optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di hutan diklat dan masih rendahnya



pemahaman masyarakat sekitar KHDTK hutan diklat tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan kehutanan maupun bidang hukum.

Upaya tindak lanjut Untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

- a. Mengajukan permohonan usulan biaya pemeliharaan dan renovasi terhadap fasilitas yang ada di KHDTK Hutan Diklat.
- b. Peningkatan kemampuan SDM KHDTK Hutan Diklat.
- c. melakukan penyuluhan yang bertujuan untuk mengajak, memotivasi, memfasilitasi dan mendampingi masyarakat secara bersama sama untuk menjaga dan melestarikan KHDTK Hutan Diklat.
- d. Melakukan pola kerja sama dengan masyarakat sekitar hutan yaitu dengan pembentukan KTH.

Efektifitas capaian kinerja kegiatan nilai KHDTK yang dikelola tahun 2020 tidak dapat dihitung dan dibandingkan karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024 dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berbeda.

Sedangkan Efisiensi capaian kinerjanya rasio yang dihasilkan sebesar 1,00 dengan kategori efisien. Output dari kegiatan ini yaitu adanya rencana pengelolaan KHDTK jangka pada 7 KHDTK di BDLHK Pekanbaru, BDLHKKadipaten, BDLHKSamarinda, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar dan BDLHK Kupang. Adapun Outcome dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Badan P2SDM berjalan lebih optimal dengan tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan praktik di lapang.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

Departemen Kehutanan bersama Departemen Pendidikan Nasional telah bekerjasama membuka Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKK) sejak tahun 2008. Sebagai SMK Model dengan berbagai nilai keunggulan, SMKK ini diharapkan menjadi pelopor dan perintis munculnya sekolah-sekolah sejenis dimasa mendatang. SMKK yang dikembangkan merupakan SMKK di lima lokasi, yaitu Kadipaten, Pekanbaru, Samarinda, Makassar dan Manokwari.

Kegiatan Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) menghasilkan sebanyak 466 orang dari target 466 orang dengan persentase 100%. Elemen kegiatan tersebut berupa pembinaan teknis dengan target fisik berupa 1 laporan sebesar 100%.



Maksud dibentuknya SMKK Kehutanan adalah untuk menyediakan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang profesional, mandiri dan berahlak mulia serta siap memasuki lapangan kerja sesuai dengan kualifikasinya. Bentuk kegiatan yang mendukung pembinaan SMKK antara lain:

1. Fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik SMK Kehutanan

Sebagai Instansi pembina teknis SMK Kehutanan Pusat Diklat SDM LHK melakukan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK Kehutanan

2. Lomba karya tulis peserta didik SMK Kehutanan Negeri

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, seluruh siswa SMKK Negeri dikembalikan kepada orang tua dan belajar mandiri. Selama masa belajar mandiri tersebut, siswa kelas 12 wajib membuat karya tulis yang berisi hasil observasi masing-masing siswa dan pengalaman serta harapan selama sekolah di SMK Kehutanan.

Bidang keilmuan kehutanan yang mejadi fokus tulisan berdasarkan penjurusan yang diambil di sekolah, yaitu teknik rehabilitasi dan reklamasi lahan, teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, teknis produksi hasil hutan dan teknik konservasi sumberdaya hutan.

3. Pembinaan teknis SMK Kehutanan

Kegiatan pembinaan teknis SMKK Kehutanan bertujuan untuk memberikan pembinaan teknis kepada SMK Kehutanan yang di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu SMK kehutanan Kadipaten, SMK kehutanan Pekanbaru, SMK Kehutanan Samarinda, SMK kehutanan Makassar dan SMK kehutanan Manokwari. Adapun kegiatannya yaitu supervisi/monitoring/pengawasan penyelenggaraan SMK Kehutanan, menghadiri wisuda siswa SMK Kehutanan, rapat-rapat/koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait, dan konsultasi/koordinasi mengikuti rapat dengan instansi terkait penyelenggaraan SMK Kehutanan.

4. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan

Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi guru SMK Kehutanan kompetensi keahlian teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, mata pelajaran pengukuran dan perpetaan digital, kompetensi keahlian teknik produksi hasil hasil hutan mata pelajaran pengujian kayu bulat dan kayu gergajian, Kehutanan kompetensi keahlian teknik konservasi sumberdaya hutan mata pelajaran pembinaan populasi dan habitat, dan kompetensi



keahlian teknologi produksi hasil hutan mata pelajaran pemanenan hasil hutan

Keberhasilan dari kegiatan teknis menengah kejuruan kehutanan adalah lomba karya tulis peserta didik SMK Kehutanan Negeri yang menghasilkan sebuah karya tulis sebagai bentuk hasil pembelajaran para siswa selama bersekolah di SMK Kehutanan Negeri.

Output dari indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan adalah dokumen Perencanaan dan Pembinaan berupa laporan pembinaan SMKK, dengan outcome adalah meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan Kehutanan.

Capaian kinerja untuk kegiatan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia tahun 2020 mencapai target yaitu 466 lulusan (100%). Adapun tabel capaian kinerja sesuai tabel 21.

Tabel 21. Sebaran lulusan tenaga menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2020

No.	SMKK Negeri	Jumlah Siswa (orang)			
		Target (Orang)	Realisasi		
			L	P	Jumlah
1.	Kadipaten	96	76	20	96
2.	Pekanbaru	104	80	24	104
3.	Samarinda	102	74	28	102
4.	Makassar	94	77	17	94
5.	Manokwari	70	54	16	70
	Jumlah	466	361	105	466

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kurangnya pengawasan perilaku dan cara belajar siswa SMKK oleh para tenaga pendidik dan kependidikan.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan ini adalah perlu pembinaan siswa secara intensif dari tenaga pendidik dan kependidikan secara bergantian dalam mengawasi perkembangan siswa agar terhindar dari pelanggaran disiplin dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa SMK Kehutanan Negeri.



Gambar 4. Praktek kerja bagi siswa SMK Kehutanan agar memiliki kompetensi dan siap berkompetisi di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Gambar 5. Buku yang Berisi Karya Tulis Siswa SMK Kehutanan Negeri

Efektifitas capaian kinerja kegiatan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia tahun 2020 tidak dapat dihitung dan dibandingkan karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024 dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berbeda.

Sedangkan Efisiensi capaian kinerjanya untuk tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia, rasio yang dihasilkan sebesar 1,00 dengan kategori efisien. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya sebanyak 466 orang tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten. Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu pengelolaan kehutanan pada tingkat tapak dapat tercapai sesuai arahan dan sasaran pembangunan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Realisasi Anggaran

1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 adalah sebesar Rp.40.469.312.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.618.323.838,- atau sebesar 97,90%.

Pelaksanaan Capaian Anggaran IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Pelaksanaan Capaian Anggaran IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp.) x Rp 1.000	Realisasi (Rp.)	%	Target		Realisasi		%		
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 56.104 orang	14.845.542.000,-	14.492.752.849,-	97,92	9.617	Orang	9.781	Orang	101,71
		b	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 225 orang	2.872.440.000,-	2.870.171.516,-	99,92	23	Orang	17	Orang	73,91
		c	Nilai KHDTK yang dikelola, 70 poin	100.000.000,-	99.844.400,-	99,84	66,5	poin	66,5	poin	100
2	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	385.350.000,-	384.991.100,-	99,91	466	Orang	466	Orang	100	
Rata-Rata Capaian Fisik										93,91	

2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

Realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,90%, dan capaian fisik untuk APBN-P sebesar 97,90%. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK yang tidak mencapai target yaitu SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3) dengan target 23 orang, namun realisasinya sebesar 17 orang (73,91%). Hal ini dikarenakan saat munculnya pandemi COVID-19, metode pembelajaran pada perguruan tinggi menjadi pembelajaran jarak jauh dan karyasiswa yang harus melaksanakan penelitian harus ditunda sampai pandemi mereda sehingga berakibat pada mundurnya jadwal penelitian, penyusunan tesis/disertasi dan kelulusan.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi ke perguruan tinggi, melakukan pemantauan database dengan tindak lanjut menghubungi bersangkutan yang telah mencapai waktu lulus, memberikan surat tanggapan terhadap pelaporan kemajuan studi dan *coaching clinic* serta *workshop* bagi karya siswa yang diselenggarakan untuk mempertemukan dan membangun komitmen para pihak dalam penyelesaian tugas belajar S2 dan S3 KLHK serta keefektifan dalam monitoring dan evaluasi.



BAB IV

PENUTUP

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan perangkat organisasi atau unit kerja eselon II yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan berada di bawah dalam pembinaan Badan P2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan 6 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu “SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya, SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa S2 dan S3, nilai KHDTK yang dikelola, dan tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan IKK menghasilkan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.847.759.865,- dari target Rp. 18.203.332.000,- atau 98,05%. Pagu Satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebesar Rp.40.469.312.000,- dengan realisasi sebesar Rp.39.618.323.838,- atau sebesar 97,90%.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 capaian kinerja fisik Pusat Diklat SDM LHK untuk meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 97,90%, masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan efisien dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai target yang dijanjikan dalam penetapan kinerja, namun rasio efektifitas pada tahun 2020 tidak dapat dihitung, karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja capaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.



LAMPIRAN

Lampiran 1.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/ Komponen	Satuan	TARGET					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM													
I. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur													
Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	01. Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01. Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten 1.1 Diklat Teknis di tingkat tapak	Orang	2310	3210	3210	3210	3210	11.550.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000	18.100.000
		02. Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK - SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya a. Diklat Teknis dan Fungsional b. Diklat Administrasi c. Diklat Kepemimpinan d. Pendukung Kediklatan	Orang	950	1251	1251	1251	1251	12.015.675	16.868.481	16.868.481	16.868.481	16.868.481
		03. SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa - SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa a. Pendidikan Program S2 Dalam Negeri b. Pendidikan Program S3 Dalam Negeri c. Pengelolaan Pendidikan	Orang	45	45	45	45	45	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		04. Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha - Pelatihan Vokasi a. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi	Orang	7000	7000	7000	7000	7000	48.000.000	49.400.000	50.900.000	52.500.000	52.500.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Komponen	Satuan	TARGET					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	02. Meningkatnya efektifitas pengelolaan KHDTK	01. Indeks efektifitas pengelolaan KHDTK - Nilai KHDTK yang dikelola a. Pengembangan KHDTK sebagaimana Pengembangan Diklat	Poin	66,5	67,0	68,0	69,0	70,0	3.930.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
II. Penyelenggaraan Pendidikan MenengahKejuruan													
	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	01 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat - Tenaga teknis menengah Kejuruan yang teredia a.Penyelenggaraan PendidikanMenengah Kejuruan b.Dokumen Perencanaan	Orang	472	473	473	473	473	109.370.000	112.900.000	116.300.000	119.800.000	123.400.000
III. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BadanP2SDM													

	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM	01. Layanan Dukungan Manajemen pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan a. Penyusunan rencana Program, dan penyusunan Rencana Anggaran b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi c. Pengelolaan Kepegawaian d. Pelayanan umum dan Perlengkapan 02. Layanan Perkantoran a. Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 03. Layanan Saran dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	22.640.980	24.905.078	27.395.586	30.135.144	33.148.659
--	---	---	---------	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------

Lampiran 2

MATRIX RENCANA KERJA TAHUNAN PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan				40.083.962.000				
		Meningkatnya kapasitas SDM LHK							
			a. SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	9.617 orang		Non Prioritas	Penguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	Pusat Diklat SDM LHK : 4.838 orang dan 7 (tujuh) Balai Diklat LHK : 4.779 orang (BDLHK Pekanbaru : 690 orang, BDLHK Bogor : 660 orang, BDLHK Makassar : 789 orang, BDLHK Samarinda : 660 orang, BDLHK Kupang : 660 orang, BDLHK Pematangsiantar : 660 orang, BDLHK Kadipaten : 660 orang)
			b. SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 & S3)	23 orang		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat Diklat SDM LHK
			c. Nilai KHDTK yang dikelola	66.5 poin		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	- KHDTK Bukit Suligi, Riau - KHDTK Sawala, Majalengka (Jawa Barat) - KHDTK Loa Haur, Samarinda - KHDTK Tabo-tabo, Makassar - KHDTK Sisimisanam, Kupang - KHDTK Rumpin, Bogor - KHDTK Pondok Buluh, Pematangsiantar (Sumatera Utara)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan				385.350.000				
		Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan							
			Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	466 orang		Prioritas Nasional	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Lingkungan satuan pendidikan yang bersih, sehat, ramah dan bebas kekerasan	SMKKN Kadipaten : 96 orang SMKKN Pekanbaru : 104 orang SMKKN Makassar : 94 orang SMKKN Samarinda : 102 orang SMKKN Manokwari : 70 orang

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)									
Nilai KHDTK yang dikelola	A	Pengelolaan KHDTK	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Rp	Masukan	:	- Dana	100.000.000	
				Orang			- SDM	10	
				Laporan	Keluaran	:	Nilai KHDTK yang dikelola	1	
				Laporan	Hasil	:	Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan diklat oleh BDLHK	1	
				-	Manfaat	:	Hutan diklat dapat dimanfaatkan secara optimal	-	
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	B	Penyusunan Modul dan Video	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Rp	Masukan	:	- Dana	350.000.000	
				Orang			- SDM	10	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan penyusunan modul dan video	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya modul dan video untuk diklat jarak jauh (e-learning)	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)							
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)							
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	C Hibah Luar Negeri - Pengembangan Kursil/Modul Baru, - Training Workshop Blended Learning, - Face to Face on Site Training (Blended Learning for Various Training), - KPH Operationalization and Change Management Trainings; - Central Level Administration-Knowledge Centre Developer - Competitions, - Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), Perencanaan dan Program Diklat Jangka Panjang	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Rp	Masukan	:	- Dana	2.783.259.000
			Orang			- SDM	10
			Laporan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan hibah luar negeri	7
			Laporan	Hasil	:	Tersedianya laporan kegiatan hibah luar negeri	7

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)							
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)							
Terlaksananya pembinaan dan	A	Laporan Evaluasi Pasca Diklat	Rp	Masukan	:	- Dana	151.735.000
			Orang			- SDM	100

pengembangan organisasi diklat			Laporan	Keluaran	:	Laporan evaluasi pasca diklat	1	
			Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Evaluasi Pasca Diklat	1	
			-	Manfaat	:	Mengetahui penyelenggaraan diklat berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan	-	
	B	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	Rp	Masukan	:	- Dana	127.930.000	
			Orang		:	- SDM	100	
			Laporan	Keluaran	:	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan diklat	20	
			Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan diklat	20	
			-	Manfaat	:	Mengetahui penyelenggaraan diklat berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	C	Jumlah Buku Terbitan/Majalah/Leaflet	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	86.845.000	
				Orang			- SDM	12	
				Edisi	Keluaran	:	Majalah Silvika	3	
				Edisi	Hasil	:	Tersedianya majalah Silvika Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Orang			- SDM	12	
				Judul	Keluaran	:	Leaflet Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Judul	Hasil	:	Tersedianya Leaflet Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Orang			- SDM	12	
				Judul	Keluaran	:	Buku Terbitan Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Judul	Hasil	:	Tersedianya Buku Terbitan Pusat Diklat SDM LHK	3	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan	
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7		
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)								
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)								
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	D	Pengelolaan Informasi Kediklatan	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	: - Dana	25.895.000	
				Orang		: - SDM	3	
				Laporan	Keluaran	: Website Kediklatan	1	
				Laporan	Hasil	: Informasi kediklatan tersedia bagi pengguna diklat	1	
	E	Laporan Pengembangan Kerjasama Kediklatan		Rp	Masukan	: - Dana	60.695.000	
				Orang		: - SDM	50	
				Laporan	Keluaran	: Laporan Kerjasama Kediklatan	1	
				Laporan	Hasil	: Tersedianya Laporan Kerjasama Kediklatan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan			
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)					
1	2	3	4	5			7			
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)										
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)										
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	F	Laporan Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal		Rp	Masukan	:	- Dana	22.360.000		
				Orang			- SDM	100		
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Akreditasi	1		
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Akreditasi	1		
	G	Laporan Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP)	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama		Rp	Masukan	:	- Dana	11.875.000	
					Orang			- SDM	35	
					Laporan	Keluaran	:	Laporan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	1	
					Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	1	
	H	Laporan Evaluasi Pelaporan dan Publikasi			Rp	Masukan	:	- Dana	119.100.000	
					Orang			- SDM	35	
					Laporan	Keluaran	:	Laporan kegiatan evaluasi pelaporan	1	
					Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan kegiatan evaluasi pelaporan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)							
Diklat Teknis (EK1)							
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	A	Penyelenggaraan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Izin Jarak Jauh Secara Elektronik (E-Learning)	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	: - Dana	326.200.000
				Orang		- SDM	7
				Orang	Keluaran	: Non aparatur LHK (Petani Hutan dan Pendamping) yang mengikuti Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Izin Jarak Jauh Secara Elektronik (E-Learning)	482
				Orang	Hasil	: Tersedianya Non aparatur LHK (Petani Hutan dan Pendamping) yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	482
	B	Penyelenggaraan Pelatihan Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum Secara Elektronik (E-Learning)	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	: - Dana	130.570.000
				Orang		- SDM	7
				Orang	Keluaran	: Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum Secara	86

					Elektronik (E-Learning)		
			Orang	Hasil	:	Tersedianya Non aparaturnya LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan keketuhanan	86

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	C	Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Neraca Air Sebagai Dasar Mitigasi Bencana Alam Dan Rehabilitasi Lahan Secara Elektronik (E-Learning)	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	137.370.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Analisis Neraca Air Sebagai Dasar Mitigasi Bencana Alam Dan Rehabilitasi Lahan Secara Elektronik (E-Learning)	198	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	198	
	D	Penyelenggaraan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program Perhutanan Sosial Secara Elektronik/E-Learning	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	277.800.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program Perhutanan Sosial	180	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)							
Diklat Teknis (EK1)							
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	E	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	: - Dana	102.000.000	
			Orang		- SDM	7	
			Orang	Keluaran	: Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program TORA Secara Elektronik (E Learning)	120	
			Orang	Hasil	: Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	120	
	F		Rp	Masukan	: - Dana	3.994.251.000	
			Orang		- SDM	7	
			Orang	Keluaran	: Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH Dan KUPS Dalam Pengelolaan Usaha) Secara Blended Learning	1.983	
			Orang	Hasil	: Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	1.983	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)								
Diklat Teknis (EK1)								
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	G	Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pendamping	Rp	Masukan	:	- Dana	150.000.000	
			Orang			- SDM	7	
			Orang	Keluaran	:	Aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Bagi Pendamping	93	
			Orang	Hasil	:	Tersedianya Aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	93	
	H	Penyelenggaraan Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KUPS Dalam Pengelolaan Usaha) Secara Klasikal On Site	Rp	Masukan	:	- Dana	2.115.749.000	
			Orang			- SDM	7	
			Laporan	Keluaran	:	Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KUPS Dalam Pengelolaan Usaha) Secara Klasikal On Site	682	
			Laporan	Hasil	:	Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	682	
		Sub Bidang Diklat Teknis						

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)							
Diklat Teknis (EK1)							
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	I	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	: - Dana	45.650.000
				Orang		: - SDM	7
				Laporan	Keluaran	: Laporan kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik SMK Kehutanan	1
				Laporan	Hasil	: Tersedianya Laporan kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik SMK Kehutanan	1
	J	Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	: - Dana	70.350.000
				Orang		: - SDM	7
				Laporan	Keluaran	: Laporan pendukung kegiatan lomba karya tulis peserta didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020	1
				Laporan	Hasil	: Tersedianya Laporan pendukung kegiatan lomba karya tulis peserta didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020	1

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	K	Pembinaan Teknis SMK Kehutanan Dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	92.600.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Pembinaan Teknis SMK Kehutanan Dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Pembinaan Teknis SMK Kehutanan Dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	A	Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Polhut Tingkat Ahli	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	12.235.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Penjurangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya	69	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pejabat Fungsional Polhut yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	0	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan	
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)								
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)								
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	B	Penyelenggaraan Pelatihan Penjurangan PEH Jenjang Madya Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	: - Dana	150.680.000	
				Orang		- SDM	7	
				Orang	Keluaran	: Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Penjurangan PEH Jenjang Madya Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)	64	
				Orang	Hasil	: Tersedianya pejabat Fungsional PEH yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	64	

Lampiran 3.

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Kegiatan		Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target		Realisasi		%
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM LHK	a. SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	8.532.429.000,-	8.226.765.734,-	98,01	9.617	Orang	9.781	Orang	101,71
			b. SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3),	2.872.440.000,-	2.870.171.516,-	99,92	23	Orang	17	Orang	73,91
			c. Nilai KHDTK yang dikelola	100.000.000,-	100.000.000,-	99,84	66,5	poin	66,5	poin	100
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	385.350.000,-	384.991.100,-	99,91	466	Orang	466	Orang	100

Keterangan : Realisasi Pusdiklat SDM LHK 4.989 orang; BDLHK Pematangsiantar 669 orang; BDLHK Pekanbaru 690 orang; BDLHK Bogor 660 orang;

BDLHK Kadipaten 662 orang; BDLHK Samarinda 660 orang; BDLHK Makassar 789 orang; BDLHK Kupang 662 orang.

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.**

Jabatan : **Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Helmi Basalamah, MM**

Jabatan : **Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Pihak Pertama,

Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19701130 199503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDM Aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	3.260 orang
		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa	45 orang
		Nilai KHDTK yang dikelola	55 poin
2.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	472 orang

- Kegiatan**
1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK
 2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
 3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

Anggaran
Rp 45.070.484.000,-

Pihak Kedua,



Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, November 2019
Pihak Pertama,



Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19701130 199503 2 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Mariana Lubis, M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, M.M.

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Juli 2020

Pihak Pertama,

Ir. Mariana Lubis, M.M.
NIP. 19621112 199101 2 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDM Aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	5.507 orang
		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa	23 orang
		Nilai KHDTK yang dikelola	66,5 poin
2.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	466 orang

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK
2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

Anggaran

Rp 34.209.312.000,00

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Juli 2020
Pihak Pertama,

Ir. Mariana Lubis, M.M.
NIP. 19621112 199101 2 001